



REPUBLIK INDONESIA

AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE ROYAL GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF CAMBODIA
CONCERNING
COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE

The Government of the Republic of Indonesia and the Royal Government of the Kingdom of Cambodia hereinafter referred to as the "Parties";

Desiring to enhance and strengthen the existing bilateral relations between the two countries through cooperative activities in the field of defence in the spirit of ASEAN, mutual trust and understanding;

Affirming that developing friendly relations and cooperation between the Parties will contribute to international peace and security by means of creating mutual confidence, understanding and cooperation in international relations;

Recognizing the long-lasting relationship between the Government of the Republic of Indonesia and the Royal Government of the Kingdom of Cambodia on various fields of defence and military-related cooperation;

Noting that the strengthening of defence cooperation will contribute to the mutually beneficial relations of both national defences;

Pursuant to the prevailing laws and regulations of the two countries;

Have agreed as follows:

ARTICLE 1 PURPOSE

The purpose of this Agreement is to provide a general framework for promoting bilateral cooperation in the field of defence between the Parties in areas of mutual interest, based on the principles of equality, mutual benefit and full respect of sovereignty and territorial integrity.

ARTICLE 2 SCOPE OF COOPERATION

The scope of cooperation of this Agreement may include:

1. Regular bilateral dialogue and consultation on strategic defence and military issues of common interest;
2. Exchange of visits between defence and Armed Forces agencies;
3. Exchange of the visits of the high ranking official, including Armed Forces;
4. Exchange of information in the military intelligence;
5. Cooperation in science and technology in defence industry;
6. Promoting cooperation of the Armed Forces;
7. Promoting capacity building in the field of defence and military through education and training programs; and
8. Other mutually agreed areas.

ARTICLE 3 COMPETENT AUTHORITIES

The competent authorities entrusted with the implementation of this Agreement are:

1. For Indonesian side: The Ministry of Defence;
2. For Cambodian side: The Ministry of National Defence.

ARTICLE 4 PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

1. The Parties shall prevent unauthorized use and transfer of under this Agreement in accordance with respective national laws and regulations of their countries as well as the international agreement to which their countries are party.
2. The protection and distribution of intellectual property rights including protection of a third party's legitimate right, as well as the consideration of equitable portion of ownership based on the contribution of the respective Parties, shall be arranged through

separate written arrangements by the Parties on the specific areas of cooperation.

**ARTICLE 5
FINANCIAL ARRANGEMENTS**

Unless decided otherwise by the Parties, each Party shall bear its own expenses in the implementation of this Agreement and in accordance with its budgetary allocations.

**ARTICLE 6
SETTLEMENT OF DISPUTES**

Any matter arising on the interpretation or implementation from this Agreement shall be settled amicably between the Parties.

**ARTICLE 7
AMENDMENTS**

This Agreement may be amended or revised based on the mutual consent of the Parties and shall form as a separate Protocol as an integral part of this Agreement. Such Protocol shall come into force on the receipt of the last written notification of the fulfillment of necessary internal state procedures by the Parties.

**ARTICLE 8
ENTRY INTO FORCE AND TERMINATION**

1. This Agreement shall enter into force on the date of the last written notification through diplomatic channels on accomplishment by the Parties of proper internal states procedures, necessary for the entry into force of this Agreement.
2. Any previous cooperation between the Parties remain valid under this Agreement, unless those cooperation are incompatible with the spirit of any provisions of this Agreement.
3. This Agreement shall remain in force for a period of 5 (five) years and shall automatically be extended for subsequent periods of 5 (five) years. Either Party may terminate this Agreement by giving written notification through diplomatic channels at least 6 (six) months prior to the date of its intended termination.

4. The termination of this Agreement shall not affect the validity or duration of any activities that were ongoing prior to the termination, unless agreed otherwise by the Parties.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE at Pampangga, on this 23 day of, October 2017 in the Indonesian, Khmer and English languages, all the texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.

**FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA,**

**FOR THE ROYAL GOVERNMENT OF
THE KINGDOM OF CAMBODIA,**



**RYAMIZARD RYACUDU
MINISTER OF DEFENCE**



**SAMDECH PICHEYSENA TEA BANH
DEPUTY PRIME MINISTER,
MINISTER OF NATIONAL DEFENCE**



REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KERAJAAN KAMBOJA
TENTANG
KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja yang selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak";

Berkeinginan untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral yang ada antara kedua negara melalui kegiatan kerja sama di bidang pertahanan dalam semangat ASEAN, saling percaya, dan saling pengertian;

Menegaskan bahwa mengembangkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara Para Pihak akan berkontribusi pada perdamaian dan keamanan internasional dengan cara menciptakan saling percaya, memahami, dan bekerja sama dalam hubungan internasional;

Mengakui hubungan jangka panjang antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja dalam berbagai bidang kerja sama pertahanan dan militer;

Memperhatikan bahwa penguatan kerja sama pertahanan akan memberikan kontribusi yang saling menguntungkan pada hubungan pertahanan nasional kedua negara;

Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di kedua negara;

Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut..

PASAL 1 TUJUAN

Tujuan dari Persetujuan ini adalah menyediakan kerangka kerja umum untuk meningkatkan kerja sama bilateral di bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama Para Pihak dalam pertahanan, berdasarkan prinsip kesetaraan, manfaat bersama, dan penghormatan penuh atas kedaulatan dan integritas teritorial.

PASAL 2 LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama Persetujuan ini mencakup

1. dialog dan konsultasi bilateral reguler mengenai isu pertahanan dan militer strategis yang menjadi kepentingan bersama;
2. pertukaran kunjungan antara Badan Pertahanan dan Angkatan Bersenjata;
3. pertukaran kunjungan pejabat tinggi, termasuk dari Angkatan Bersenjata;
4. pertukaran informasi dalam intelijen militer;
5. kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang industri pertahanan;
6. meningkatkan kerja sama antar-Angkatan Bersenjata;
7. meningkatkan kapasitas di bidang pertahanan dan militer melalui program pendidikan dan pelatihan; dan
8. bidang-bidang lain yang disepakati bersama.

PASAL 3 OTORITAS BERWENANG

Otoritas berwenang yang ditugasi melaksanakan Persetujuan ini adalah

1. Untuk pihak Indonesia: Kementerian Pertahanan,
2. Untuk pihak Kamboja: Kementerian Pertahanan Nasional.

PASAL 4 PELINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Para Pihak harus mencegah penggunaan dan pemindahan yang tidak sah atas hak-hak kekayaan intelektual yang dipindahkan, dipertukarkan, atau dihasilkan berdasarkan Persetujuan ini sesuai dengan hukum dan peraturan nasional masing-masing negara mereka

dan kesepakatan internasional lain dimana negara mereka menjadi Pihak.

2. Pelindungan dan pendistribusian hak kekayaan intelektual termasuk pelindungan hak sah pihak ketiga, serta pembagian kepemilikan yang adil berdasarkan kontribusi masing-masing Pihak, diatur oleh Para Pihak melalui pengaturan tertulis terpisah pada bidang kerja sama tertentu.

PASAL 5 PENGATURAN KEUANGAN

Kecuali ditentukan lain oleh Para Pihak, masing-masing Pihak harus menanggung biaya sendiri terkait pelaksanaan Persetujuan ini dan sesuai dengan alokasi anggaran masing-masing Pihak.

PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap masalah yang timbul dari interpretasi atau implementasi dari Persetujuan ini diselesaikan secara damai antara Para Pihak.

PASAL 7 AMENDEMEN

Persetujuan ini dapat diamendemen atau direvisi berdasarkan persetujuan bersama Para Pihak dan menjadi Protokol terpisah sebagai bagian yang terintegrasi dengan Persetujuan ini. Protokol tersebut mulai berlaku pada saat diterimanya pemberitahuan tertulis terakhir tentang pemenuhan prosedur internal negara yang diperlukan oleh Para Pihak.

PASAL 8 PEMBERLAKUAN DAN PENGAKHIRAN

1. Persetujuan ini akan mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan tertulis terakhir melalui saluran diplomatik mengenai pemenuhan prosedur internal yang dilakukan oleh Para Pihak, sebagai syarat pemberlakuan Persetujuan ini.
2. Setiap kerja sama sebelumnya antara Para Pihak tetap berlaku di bawah Persetujuan ini, kecuali jika kerja sama tersebut tidak sesuai dengan semangat Persetujuan ini.

3. Persetujuan ini akan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan secara otomatis diperpanjang untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini dengan memberi tahu secara tertulis melalui saluran diplomatik paling sedikit 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhirannya.
4. Pengakhiran Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi keabsahan atau jangka waktu kegiatan yang sedang berlangsung sebelum pengakhiran tersebut, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT di Pampanga pada tanggal 23 Okt tahun 2017 dalam bahasa Indonesia, bahasa Khmer, dan bahasa Inggris; semua naskah autentik. Jika terjadi perbedaan penafsiran atas Persetujuan ini, naskah bahasa Inggris yang berlaku.

**UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA,**



**RYAMIZARD RYACUDU
MENTERI PERTAHANAN**

**UNTUK PEMERINTAH
KERAJAAN KAMBOJA,**



**SAMDECH PICHEYSENA TEA BANH
WAKIL PERDANA MENTERI,
MENTERI PERTAHANAN NASIONAL**

មាត្រា ៥
ការរៀបចំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

ប្រសិនបើពុំមានការសម្រេចចិត្តផ្សេងពីនេះដោយគុណភាព ភាគីនីមួយៗត្រូវទទួលបន្ទុកលើការចំណាយ ផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ និងយោងទៅតាមវិភាជន៍ថវិការបស់ខ្លួន ។

មាត្រា ៦
ដំណោះស្រាយវិវាទ

រាល់បញ្ហាដែលកើតមានឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងការបកប្រែ ឬការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ត្រូវដោះស្រាយ ដោយការយោគយល់គ្នារវាងគុណភាព។

មាត្រា ៧
ការធ្វើវិសោធនកម្ម

កិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្ម ឬកែសម្រួល ដោយផ្អែកលើការព្រមព្រៀងគ្នាទៅវិញ ទៅមករបស់គុណភាព នឹងត្រូវបង្កើតពិធីសារដោយឡែកមួយ ដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀង នេះ។ ពិធីសារនេះ នឹងចូលជាធរមានចាប់ពីពេលទទួលបានការជូន ដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរចុងក្រោយ នៃការបំពេញនីតិវិធីផ្ទៃក្នុងរដ្ឋ ចាំបាច់ ដោយគុណភាព។

មាត្រា ៨
ការចូលជាធរមាន និងការបញ្ចប់

១. កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ នឹងចូលជាធរមានចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃការជូនដំណឹងចុងក្រោយ ជាលាយលក្ខណ៍ អក្សរតាមផ្លូវការទូត លើសមិទ្ធផលដោយគុណភាពនៃនីតិវិធីត្រឹមត្រូវផ្ទៃក្នុងរដ្ឋដែលចាំបាច់ សម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ចូលជាធរមាន។

២. រាល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីមុនរវាងភាគីទាំងពីរ រក្សាសុពលភាពដដែលក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ លុះត្រាតែកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាំងនោះមិនស្របតាមស្មារតីដែលមានចែង នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។

៣. កិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់រយៈពេល៥ (ប្រាំ) ឆ្នាំ និងត្រូវបន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់ រយៈពេល៥ (ប្រាំ) ឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ទៀត។ ភាគីណាមួយក្នុងចំណោមភាគីទាំងពីរអាចបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ តាមការជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរតាមផ្លូវការទូតយ៉ាងតិចរយៈពេល៦ (ប្រាំមួយ) ខែ មុនកាលបរិច្ឆេទនៃការ បញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀង តាមបំណងរបស់ខ្លួន។

មាត្រា ២

វិសាលភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

វិសាលភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ អាចរួមមាន៖

- ១. កិច្ចសន្ទនា និងការពិគ្រោះយោបល់ទ្វេភាគីជាទៀងទាត់លើយុទ្ធសាស្ត្រការពារជាតិ និងបញ្ហាយោធា នៃផលប្រយោជន៍រួម។
- ២. ការផ្លាស់ប្តូរដំណើរទស្សនកិច្ចរវាងស្ថាប័នការពារជាតិ និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ
- ៣. ការផ្លាស់ប្តូរដំណើរទស្សនកិច្ចនៃមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ រួមទាំងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ
- ៤. ការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានចារកម្មយោធា
- ៥. កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកទេសក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មការពារជាតិ
- ៦. ការលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ
- ៧. លើកកម្ពស់ការកសាងសមត្ថភាពក្នុងវិស័យការពារជាតិ និងយោធាតាមរយៈការបណ្តុះបណ្តាល និងកម្មវិធីហ្វឹកហ្វឺន និង
- ៨. វិស័យផ្សេងៗទៀតដែលបានឯកភាពគ្នា។

មាត្រា ៣

អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច

អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដែលទទួលបានអនុវត្តនូវកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺ៖

- ១. សម្រាប់ភាគីឥណ្ឌូនេស៊ី : ក្រសួងការពារជាតិ
- ២. សម្រាប់ភាគីកម្ពុជា : ក្រសួងការពារជាតិ

មាត្រា ៤

ការការពារសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញា

១. គុភាគីត្រូវទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់ និងការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដោយគ្មានការអនុញ្ញាត ចំពោះការផ្ទេរ ការផ្លាស់ប្តូរ ឬការបង្កើតដែលស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ដោយយោងតាមច្បាប់ជាតិ និងបទប្បញ្ញត្តិនៃ សាមីប្រទេស ក៏ដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិនៃប្រទេសនីមួយៗ។

២. ការការពារ និងការចែកចាយសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញា រួមបញ្ចូលការការពារសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ ភាគីទីបី រួមទាំងការពិចារណាអំពីចំណែកនៃកម្មសិទ្ធិភាព ដោយផ្អែកលើការចូលរួមចំណែករបស់ គុភាគី នឹងត្រូវធ្វើឡើង តាមការរៀបចំដាច់ដោយឡែកជាលាយលក្ខណ៍ដោយគុភាគី នៅក្នុងវិស័យជាក់លាក់នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ។

